



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

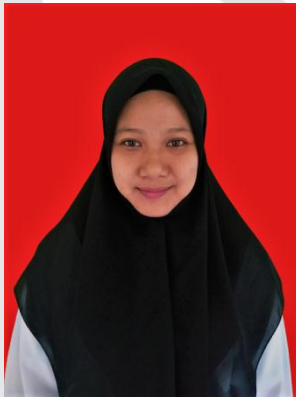
**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN EFEKTIVITASNYA
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DISUSUN OLEH:

DWI REZKI APRIYANITA

01770623326



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : DWI REZKI APRIYANITA
NIM : 01770623326
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN
EFEKTIVITASNYA PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
TANGGAL UJIAN : 28 APRIL 2020

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I



Irien Violinda Aggriani, SE, M.Si
NIP. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II



Dr. Muhammad April, SH, M.Hum
NIK. 130712072

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DWI REZKI APRIYANITA

NIM : 01770623326

PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN EFEKTIFITASNYA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANGGAL UJIAN : 28 APRIL 2020

DISETUJUI OLEH:

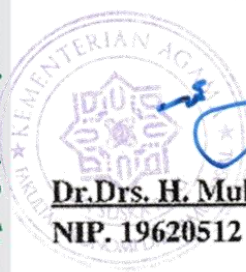
PEMBIMBING



Khairil Henry SE, M.Si, Ak
NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

DEKAN



Dr.Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI



Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN EFEKTIFITASNYA
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh:

Dwi Rezki Apriyanita

NIM: 01770623326

Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan untuk memastikan tingkat keberhasilan antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, kendala – kendala dalam pemungutan pajak air tanah dan efektifitasnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini yaitu untuk memaparkan solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan sistem *Official Assessment System*, dimana fiskus atau pemerintah menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang, berdasarkan laporan pemakaian air tanah yang diberikan oleh wajib pajak. Pemungutan Pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti terhitung dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 belum Efektif karena melihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar hanya satu, sehingga belum mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Air Tanah, Efektivitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah dan Efektifitasnya Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga diberikan syafaat dari – Nya. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan TA ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan TA ini.

Penyelesaian TA ini tidak luput dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Kepada Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Muhammad Yani (Alm) dan Ibunda yang tercinta Mulyati S.Pd yang memberikan nasehat, didikan, pelajaran hidup, tangisan dan tetesan keringat untuk anak mu sehingga bisa merasakan pendidikan setinggi ini dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Ucapan terimakasih takkan cukup untuk membalas semua pengorbanannya.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku kepala Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi serta membantu dalam memperbaiki kesalahan – kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Kepada seluruh dosen pendidik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.

Kepada para pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan selama penulis aktif kuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada segenap jajaran pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Kepada Mbak dan Adek tercinta Ade Lya Purwati S.Pd, Eka Novita Sari A.Md. Keb dan Nur Sanabiilla yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semogga Allah SWT membalas segala ketulisan dan budi baik yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal'amin.

Semoga semua bantuan dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pihak – pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Penulis

Dwi Rezki Apriyanita
Nim: 01770623326

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Dan Manfaat Penulisan	5
1.4	Metode Penulisan	6
1.4.1	Lokasi penelitian	6
1.4.2	Waktu Penulisan	6
1.4.3	Jenis Data	6
1.4.4	Teknik Pengumpulan Data	7
1.4.5	Analisa Data	8
1.5	Sistematika Penulisan	8

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1	Sejarah berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabuapetn Kepulauan Meranti	10
2.2	Visi dan Misi	11
2.3	Struktur Organisasi Kantor	12
2.4	Uraian Tugas	14

BAB III TINJAUAN TEORI & PRAKTEK

3.1	Tinjauan Teori.....	23
3.1.1	Pengertian Pajak	23
3.1.2	Fungsi Pajak	24
3.1.3	Jenis – Jenis Pajak	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Pengelompokan Pajak	28
3.1.5	Tata Cara Pemungutan Pajak	29
3.1.6	Pajak Air Tanah	32
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah	33
3.1.8	Objek Pajak Air Tanah	34
3.1.9	Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah	35
3.1.10	Izin Pengambilan Air Tanah	35
3.1.11	Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah	37
3.1.12	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak	39
3.1.13	Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak	40
3.1.14	Pembayaran dan Penagihan Pajak Air Tanah	43
3.1.15	Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	45
3.1.16	Teori Efektivitas	46
3.1.17	Pajak Menurut Islam	49
3.2	Tinjauan Praktek	53
3.2.1	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	53
3.2.2	Kendala – Kendala Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah dan Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	58
3.2.3	Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Efektifitasnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

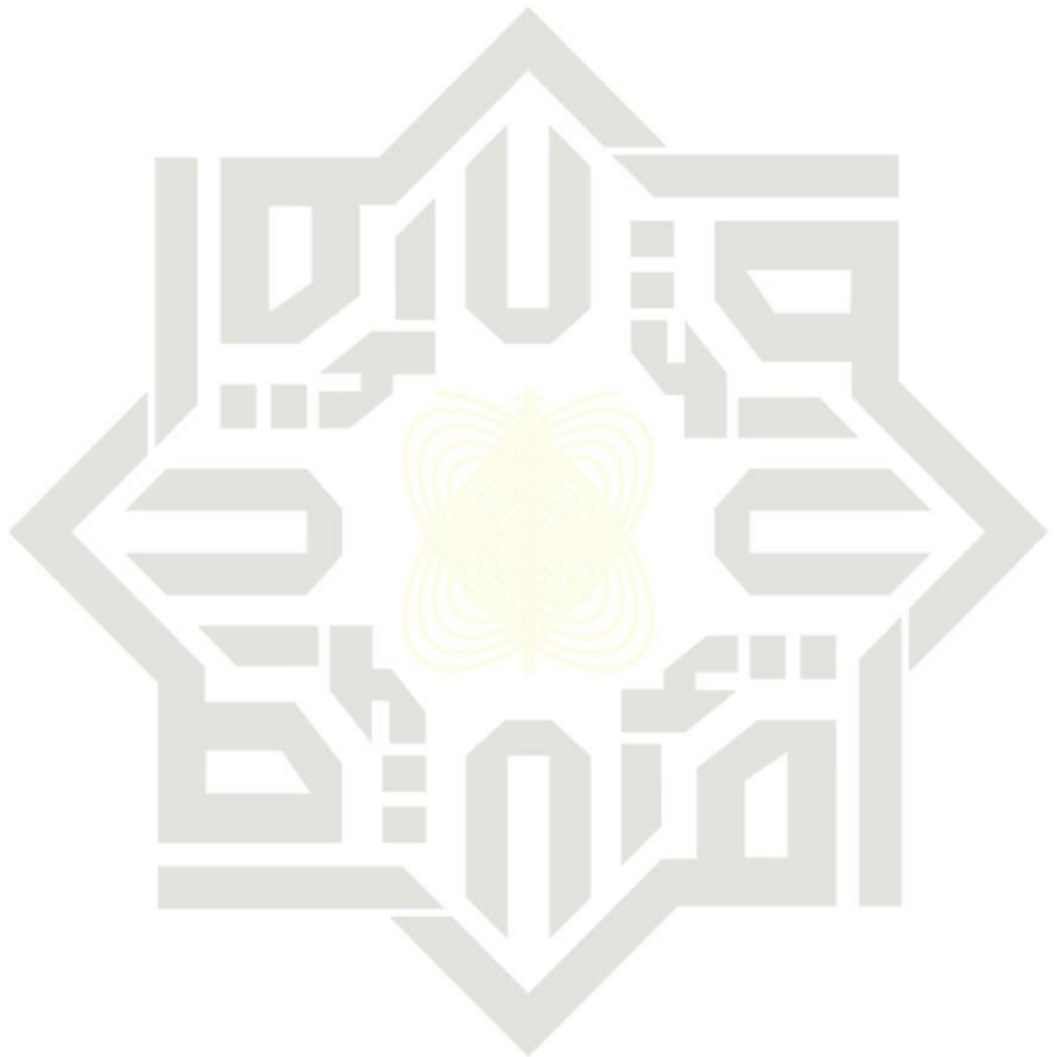
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Tahun 2017 Sampai dengan 2019	4
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Tahun 2017 Sampai dengan 2019	60
Tabel 3.2	Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	13
Gambar 3.1	Alat Pengukur Penggunaan/Pemanfaatan Air	53
Gambar 3.2	Wawancara Bersama Kasubid Penagihan Pajak Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	55
Gambar 3.3	Laporan Penggunaan Air	56
Gambar 3.4	Sumur Air Bersih 1	57
Gambar 3.5	Sumur Air Bersih 2.....	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro dalam buku Mardiasmo, (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan, diantaranya adalah sebagai sumber utama pendapatan Negara dimana pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi 2 yaitu, pajak Negara (pusat) pajak Daerah. Adapun yang termasuk kedalam pajak pusat yaitu,

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan atas barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Daerah Tingkat I dan II. Yang termasuk Daerah tingkat I yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Yang termasuk kedalam Daerah tingkat II yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. (Siahaan. 2016:493)

Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah. PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengaturan pemungutan Pajak Air Tanah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pasal 2 ayat (2) huruf h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memungut berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Sebagai upaya untuk memenuhi pendapatan Daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan daerah otonom.

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya terjadi pada perusahaan air bersih yaitu pada PT. Meranti Tirta Investasi. PT. Meranti Tirta Investasi berdiri pada tahun 2015 dengan mempunyai 2 sumur dan satu sumur mempunyai kedalaman kurang lebih 80 Meter. Perusahaan tersebut berada di Jalan Dorak Selatpanjang.

Pemungutan Pajak Air Tanah ini tidak luput dari efektivitas suatu perusahaan tersebut dalam mengelola pajak. Pengelolaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan maksimal. Dari potensi yang ada, hanya satu perusahaan yang baru berpartisipasi membayar pajak atas penggunaan air bawah tanah yaitu PT Meranti Tirta Investasi yang membayarkan pajak air tanah sementara perhotelan belum mau membayar pajak air tanahnya.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Tahun 2017 Sampai dengan 2019

NO	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	2017	60.000.000	20.825.757	34,71
2.	2018	60.000.000	18.138.291	30,23
3.	2019	60.000.000	28.497.419	47,50

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2020.

Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah. Hal ini dikarenakan kurangnya kepaahaman masyarakat dalam pemungutan pajak air tanah itu sendiri. Dari latar belakang diatas penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan dengan permasalahan yang ada dengan mengambil judul “**Analisis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemungutan Pajak Air Tanah dan Efektivitasnya Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari judul diatas penulis memperoleh masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Apakah kontribusi pajak air tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah efektif?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui Apakah kontribusi pajak air tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah efektif.

Manfaat Penulisan:

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti.
2. Untuk dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan pajak air tanah dan Pendapatan Asli Daerah.
3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pajak air tanah khususnya terhadap pemungutan dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Jalan Banglas depan gedung Afifa, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia.

1.4.2 Waktu Penulisan

Pada penulisan ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020.

1.4.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada pegawai kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan secara langsung di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab kepada narasumber di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada beberapa pegawai yang penulis anggap bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisa Data

Analisa dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu cara pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, fenomena atau keadaan kedalam beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti. (Susetyo. 2017:4)

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (*job description*), visi misi, tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan ini, karena memuat tentang tinjauan teori dan praktek yang terdiri dari pengertian pajak, fungsi dan jenis pajak, pengelompokan pajak, tata cara pemungutan, pengertian pajak daerah, pengertian pajak air tanah, subjek objek dan wajib pajak air tanah, dasar hukum pemungutan pajak air tanah, masa pajak tahun pajak saat terutang pajak dan wilayah pemungutan pajak, cara pemungutan penetapan dan ketetapan pajak, pembayaran dan penagihan pajak air tanah dan insentif pemungutan pajak air tanah. Pada bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana cara Pemungutan Pajak Air Tanah dan efektivitasnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditemukan atas dasar penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Awalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang bertempat di jalan Merdeka No. 64 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus Tahun 2016 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menggelar Paripurna dan mengesahkan Ranperda Tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Setelah itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Awal berdirinya Kantor BPPRD dikepalai oleh Bapak Bambang Supriyanti, SE. MM. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) ini pada akhirnya berpindah tempat di Jalan Banglas Depan Gedung Afifa, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan, Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 2017 terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak H. Herman, SE. MT. Tidak lama setelah itu Pada tanggal 5 Januari 2018 terjadi lagi pergantian pimpinan yaitu Bapak Ery Suhairi, S.Sos dan pada 8 Januari 2020 terjadi lagi

pergantian pimpinan yaitu Bapak Mardiansyah S.STP, M.AP hingga sekarang .
Badan ini mengurus Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Mengelola Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.2 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1. Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

"Profesional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan utama Kabupaten Kepulauan Meranti"

2. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

- Meningkatkan pelayanan yang transparan*
- Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi*
- Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah*
- Menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah*

3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

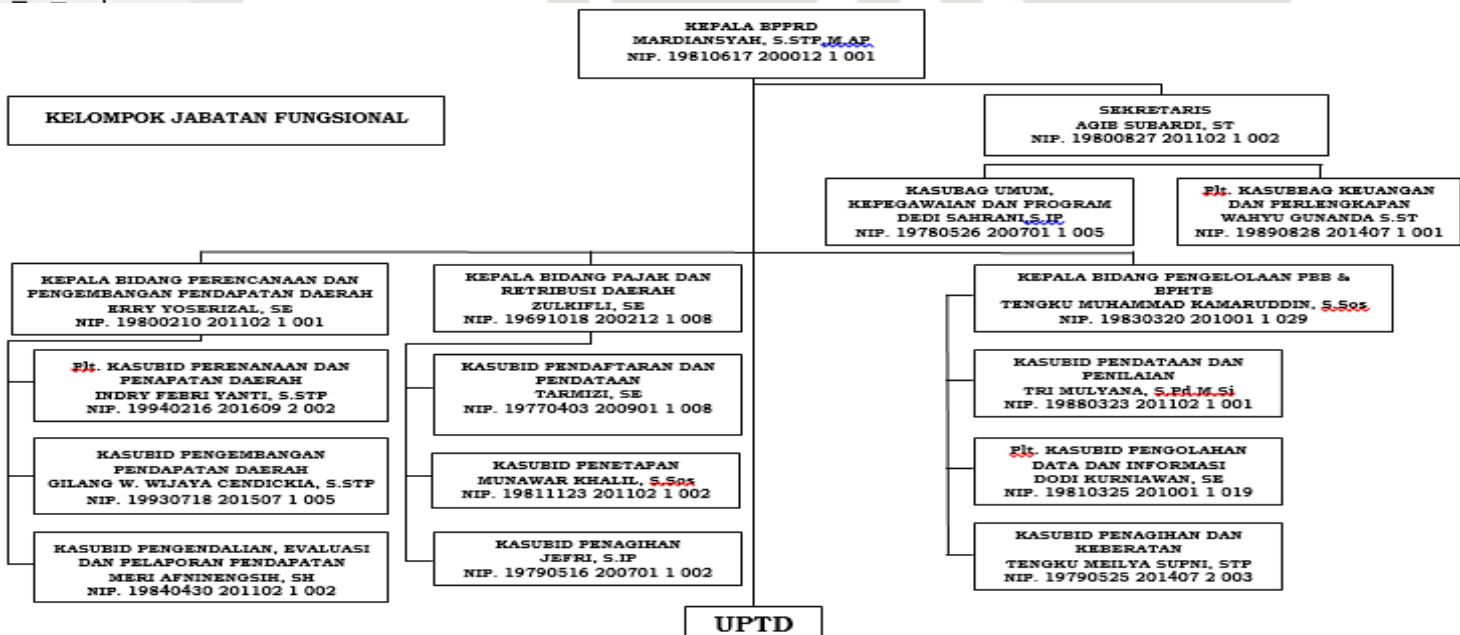
- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Dibawah ini struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti:

UIN SUSKA RIAU



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
 Sumber: Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas

1. Bidang Sekretariat

Adapun tugas pokok sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. Penyusunan rencana aksi (action plan) dan skedul waktu (time schedule) pelaksanaan pekerjaan sekretariat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan;
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat;
- e. Melakukan koordinasi internal dan pengawasan internal secara periodik minimal sekali dalam satu bulan;
- f. Melakukan konsolidasi program/kegiatan bidang;
- g. Melakukan konsolidasi realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan bidang;
- h. Mengevaluasi hasil kerja ASN dilingkungan Badan sebagai bahan pembinaan;
- i. Memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
- j. Mengkoordinasikan tugas bawahan dilingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan dilingkup sekretariat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- m. Memeriksa pelaksanaan tugas lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- n. Mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretarian agar sesai tepat pada waktunya;
- o. Menilai konsep naskah dinas dari bawahan dan unit kerja lainnya dilingkungan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- p. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja dilingkungan Badan agar pelaksanaannya tertib;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariat baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental pada pimpinan;
- r. Membuat laporan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan;
- s. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi pada badan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- t. saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa Sub Bagian yaitu :

- a. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
- b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Adapun tugas pokok bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. Penyusunan draft sistem dan prosedur perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang, memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental kepada kepala Badan;
- g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- h. Pelaksanaan evaluasi kepada aparatur pelaksana pelayanan, pemungutan dan administrasi pelayanan pajak dan retribusi pajak;
- i. Pelaksanaan verifikasi data ketetapan pajak dan retribusi daerah dan data realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melakukan kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
- k. Menyusun metode intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- l. Menyusun metode penetapan piutang pendapatan asli daerah;
- m. Menyusun metode penagihan pendapatan asli daerah;
- n. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- o. Melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi terhadap wajib pajak sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlindungan pajak; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi beberapa Sub Bagian yaitu:

- a. Sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - b. Sub bidang pengembangan pendapatan daerah; dan
 - c. Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun tugas pokok bidang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyusunan rencana aksi dan skedul waktu pelaksanaan pekerjaan bidang pajak dan retribusi daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- h. Memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- j. Melapor pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis dan berkala, maupun insidental kepada kepala Badan;
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- l. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
- m. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak dan retribusi;
- n. Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- o. Melakukan pendataan dan validasi data wajib pajak dan wajib retribusi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Melakukan permutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
- q. Menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
- r. Pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta memberi kartu pengenalan wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi;
- s. Melakukan pendaftaran kepada para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- t. Menerbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- u. Mengoreksi dan menandatangani surat ketetapan pajak / retribusi daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Tagihan Pajak /Retribusi Daerah sesuai ketentuan;
- v. Menghimpun dan membukukan seluruh surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah jenis tertentu dalam Buku Register SKPD/SKRD Tahunan;
- w. Menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan keringanan dari wajib pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan pajak;
- x. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- y. Menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- z. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- ā. Melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- ä. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan;
- ö. Menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor, nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi beberapa sub Bidang yaitu:

- a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan;
 - b. Sub bidang penetapan; dan
 - c. Sub bidang penagihan.
4. Bidang Pengelolaan PBB Dan BPHTB

Adapun tugas pokok bidang pengelolaan PBB dan BPHTB sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan PBB dan BPHTP;
- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu pengelolaan PBB dan BPHTB;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyusunan draft sistem dan prosedur pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran pengelolaan PBB dan BPHTB;
- e. Penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) bidang pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. Pemantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- g. Pemeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada kepala badan;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- k. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- l. Melakukan validasi data wajib pajak PBB P2;
- m. Melakukan penilaian kembali data objek pajak PBB P2;
- n. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;
- o. Melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak;
- p. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi para pelanggar pajak daerah;
- r. Menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTP membawahi sub bidang yaitu:

- a. Sub bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - c. Sub bidang penagihan dan keberatan.
5. Jenis Kepegawaian

Adapun jenis kepegawaian yang bekerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang telah melalui masa sebagai sementara dan telah memenuhi persyaratan pada kantor tersebut.
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- c. Pegawai Honorer dan Pegawai Honorer Kontrak.
- d. Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu mereka yang diangkat berdasarkan kebutuhan kantor dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan pada kantor tersebut.
- e. Kelompok fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diambil kesimpulan tentang Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Pelaksanaa pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan dengan menghitung volume dalam satuan meter kubik (m^3) dengan menggunakan alat water meter yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, Dalam Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan *Official Assessment System*, dimana fiskus atau pemerintah menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang, berdasarkan laporan pemakaian air tanah yang diberikan oleh wajib pajak
2. Kendala – kendala dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang hanya satu dan tidak ada pengontrolan terhadap wajib pajak yang mengambil dan memanfaatkan Air Tanah, Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah adalah dengan memasang alat water meter terhadap perusahaan yang dianggap berpotensi tinggi, dalam hal ini pemerintah akan memasang ke beberapa hotel seperti Grand Meranti Hotel, Dyva Hotel dan Aka Meranti Hotel.

Berdasarkan Observasi Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti dinyatakan belum efektif, terlihat dari persentase

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak air tanah selama 3 tahun belakangan ini yang tidak mencapai 100% atau hanya dibawah 50% yaitu 47,50%.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan memungut Pajak Air Tanah.

4.2 Saran

Setelah penulis mengamati dan menganalisa secara sekilas tentang Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis ingin memberi saran yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu:

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah perlu melakukan evaluasi tentang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 2. Dalam penentuan target, hendanya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu melakukan pengajian ulang terhadap realisasi penerimaan Pajak Air Tanah atau disesuaikan dengan keadaan saat ini agar target tersebut nantinya tercapai.
- Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai dasar penetapan Pajak Air Tanah, Perhitungan Pajak Air Tanah kepada wajib pajak agar dapat mengerti tentang tata cara perhitungan Pajak Air Tanah.
- Wajib pajak harus sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dalam menjunjung pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak tidak merasa rugi atas pemungutan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2014. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu
- Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>. Diakses pada Kamis, 05 Maret 2020 pukul 14.00 WIB
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. Teori, Prilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Muljono, Joko. 2010. Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun praktis. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015. Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018. Tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Saputri, Sinta Rintis. 2017. Pemungutan Pajak Air Tanah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Metro. Tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung. Diakses pada Senin, 06 Januari 2020 pukul 10.30 WIB
- Sahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Susetyo, Budi. 2017. Statistika Untuk Analisis Data Penelitian. Bandung: PT. Refika Aditama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafitri, Helda Liza. 2018. Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. diakses pada Rabu, 11 Maret 2020 pukul 09.00 WIB

IMBooks. 2018. Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktek. Yogyakarta: CV. Andi Offeset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**WAWANCARA**

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja kendala – kendala yang terjadi pada saat pemungutan Pajak Air Tanah?
3. Bagaimana upaya pemerintah saat ini untuk meningkatkan pendapatan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Wajib Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO BERSAMA PEGAWAI PT. MERANTI TIRTA INVESTASI



UIN SUSKA RIAU

KANTOR BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RUANG PELAYANAN BIDANG PAJAK ASLI DAERAH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/258/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 16 Januari 2020 M
20 Jumadil Awwal 1441.H

Kepada
Yth. **Khairil Henry, SE, M.Si. Ak**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Dwi Rezki Apriyanita
NIM : 01770623326
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Dekan
Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uinsuska.ac.id E-mail: fteko@uinsuska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/317/2020
Sifat : Biasa
Tempiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 20 Januari 2020 M
24 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Dwi Rezki Apriyanita
NIM. : 01770623326
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JENIS PAJAK	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	REALISASI JANUARI S/D DESEMBER	(%)	SSA
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 4-17
Pajak Air Tanah 2017	60.000.000	1.390.536	3.098.070	960.724	-	3.218.796	3.916.080	3.369.494	2.644.589	3.488.365	1.047.411	1.658.265	4.776.647	20.805.297	34,71	36.174.243
Pajak Air Tanah 2018	60.000.000	755.438	3.098.070	8.076.249	2.336.770	-	3.916.080	2.924.006	3.365.712	2.263.555	788.000	238.810	771.719	18.138.291	30,23	41.861.709
Pajak Air Tanah 2019	60.000.000	2.145.974	3.058.070	8.976.973	2.339.770	3.218.796	3.916.080	6.293.500	6.010.301	14.646.264	9.000.187	6.073.722	1.781.830	67.461.467	47,50	31.502.581
Jumlah :	180.000.000	2.145.974	3.058.070	8.976.973	2.339.770	3.218.796	3.916.080	6.293.500	6.010.301	14.646.264	9.000.187	6.073.722	1.781.830	67.461.467	37,48	112.538.533

Selektang, 10 Februari 2020
An. KEPALA BPPRD Kab. Kep. Meranti
 Uj. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah
 Kasubid Perencanaan Pendapatan Daerah
 BADAN PERCELOUPAAN
 DAN PETROKUST DAERAH
 INDR FEBRI YENIT, S.STP
 NIP. 19940216 201609 2 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
 E-Mail : dpmpstpkmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 053/DPMPTSP/II/2020/SKP/31

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29969 Tanggal 22 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama : Dwi Rezki Apriyanita
 NIM : 01770623326
 Program Studi : Perpajakan
 Jenjang : DIII
 Alamat : Pekanbaru
 Judul Penelitian : Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti
 Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 03 Februari 2020

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SEKRETARIS**



TUNJIARTO, M.Pd
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19711124 200312 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/29969

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.VII/PP.00.9/317/2020** Tanggal 20 Januari 2020 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **DWI REZKI APRIYANITA**
2. NIM / KTP : **01770623326**
3. Program Studi : **PERPAJAKAN**
4. Jenjang : **DIII**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
7. Lokasi Penelitian : **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : **Pekanbaru**
Pada Tanggal : **22 Januari 2020**



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dibagikan :

Ditampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kepulauan Meranti
- Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)





BIOGRAFI PENULIS

DWI REZKI APRIYANITA, Lahir di Selatpanjang pada tanggal 16 April 1999 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dengan nama kakak pertama Ade Lya Purwati kakak ke dua Eka Novita Sari dan adik ke empat N. Sanabiilla yang lahir dari pasangan Bapak M. Yani dan Ibu Mulyati.

Penulis mengawali pendidikan formal pada SD Negeri 07 Insit padatahun 2006, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi pada tahun 2012, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan tingkat atas yaitu di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Adminsitasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019.

Pada tanggal 28 April 2020 penulis menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Tugas Akhir **“Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah dan Efektifitasnya Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**.